

**ANALISIS LOKASI OPTIMAL PUSAT PEMERINTAHAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH DI  
KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA**



**NASKAH PUBLIKASI**

Oleh:  
**MUHAMAD HARZAN**  
NIM: E 100 100 037

**FAKULTAS GEOGRAFI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2015**

**HALAMAN PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI**

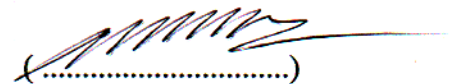
**ANALISIS LOKASI OPTIMAL PUSAT PEMERINTAHAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH DI  
KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA**

Oleh:  
**MUHAMAD HARZAN**  
NIM E 100 100 037

Naskah Publikasi ini telah diterima dan disahkan oleh  
Pembimbing Penulisan Jurnal Fakultas Geografi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta pada

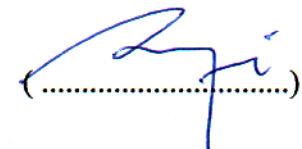
Pembimbing

Pembimbing I : Drs. M. Musiyam, M.TP.



(.....)


Pembimbing II : M. Amin Sunarhadi, S.Si., M.P.



(.....)

Surakarta, 26 Februari 2015

Mengetahui  
Dekan Fakultas Geografi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta



**Drs. Priyono, M.Si.**

**Drs. Priyono, M.Si.**

**ANALISIS LOKASI OPTIMAL PUSAT PEMERINTAHAN  
DALAM RANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH DI  
DI KABUPATEN BUTON TENGAH SULAWESI TENGGARA**

Oleh:  
Muhamad Harzan  
(NIM E 100 100 037)

**ABSTRAK**

Kabupaten Buton Tengah resmi ditetapkan menjadi daerah otonomi baru pada tanggal 24 Juni Tahun 2014 berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Propinsi Sulawesi Tenggara. Dengan dibentuknya Kabupaten Buton Tengah, maka penetapan lokasi pusat pemerintahan merupakan hal yang sangat penting untuk menunjang pembangunan yang nantinya diharapkan dapat memberikan fungsi sebagai pusat pelayanan yang optimal. Tujuan penentuan lokasi obyek-obyek adalah dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi. Terkait hal tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) mengetahui lokasi kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan metode gravitasi. (2) mengetahui lokasi kecamatan yang paling optimal sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan melalui metode skalogram. Hasil penelitian menunjukkan (1) berdasarkan analisis gravitasi dengan menggunakan indikator bobot jumlah penduduk, luas wilayah dan bobot sama pengaruh jarak menunjukkan hasil yang sama yaitu pusat pemerintahan yang optimal adalah Kecamatan Lakudo. (2) analisis skalogram menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan dan pelayanan yang juga dapat dijadikan pusat pemerintahan adalah Kecamatan Lakudo. Kecamatan ini memiliki sarana dan prasarana yang relatif lengkap yaitu 17 jenis dan jumlah unit sarana dan prasarana pembangunan terbesar yaitu 171 unit. Berdasarkan analisis gravitasi maupun skalogram, Kecamatan Lakudo telah sesuai untuk dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Buton Tengah.

Kata kunci: lokasi optimal, model gravitasi, skalogram

**OPTIMAL LOCATION ANALYSIS OF CENTRAL GOVERNMENT FOR  
REGIONAL DEVELOPMENT IN CENTRAL BUTON DISTRICT,  
PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI**

By:  
Muhamad Harzan  
(NIM E 100 100 037)

**ABSTRACT**

*District of Central Buton officially is set to be the new autonomous region on June 24<sup>th</sup>, 2014 based on the regulation Number. 15<sup>th</sup>, 2014 it is about the Establishment of District Central Buton in Province of Southeast Sulawesi. With the establishment of the District of Central Buton, the determination of the location of the center of government is very important to support development that is expected to provide a function as optimal service center. The purpose of determining the location of objects is intended to achieve a balance and efficiency. The objectives of this research are: 1) knowing of the most optimal location of the district as government center in Central Buton District based on the method of gravity. (2) Knowing the most optimal location of the district as government center in Central Buton District based on the completeness of facilities and infrastructure development through schallogram method. The result of this research are 1) based on gravity analysis using population weights indicator, the wide area and equal weight the effect of distance showed the same results that the optimal administrative center is the District of Lakudo. (2) schallogram analysis shows that the growth center and services can also be used as the center of government is the District Lakudo. This district has the infrastructure is relatively complete are 17 types and number of units of the largest infrastructure development namely 171 units. Based on the analysis of gravity and schallogram, the District Lakudo is appropriated to become the government center of District of Central Buton.*

*Keyword: optimal location, gravity model, schallogram*

## PENDAHULUAN

Pembangunan yang berlangsung di Indonesia selama ini menciptakan berbagai dimensi permasalahan yang belum terpecahkan dan masih menuntut perhatian semua pihak terutama bagi pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain adalah masih adanya ketimpangan yang cukup tinggi antar daerah, seperti antara Jawa dan luar Jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah ini selanjutnya membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, Aspek ketimpangan pembangunan antarwilayah perlu ditanggulangi melalui formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan dibutuhkan penetapan lokasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Persoalan lokasi merupakan persoalan pemilihan tempat yang sesuai dalam arti dapat memberikan efisiensi dari kegiatan tertentu, dilihat dari kegiatan itu sendiri maupun dari kaitannya dengan kegiatan ditempat-tempat lain. Pusat pertumbuhan yang selanjutnya menjadi pusat pemerintahan sangat penting artinya bagi pembangunan daerah karena pusat pemerintahan diharapkan mampu mendorong pembangunan wilayah, mendorong penyebaran

pembangunan dan meningkatkan pemerataan dalam pembangunan.

Dijadikannya ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan ditingkat kabupaten, diharapkan mampu mendorong aktifitas perekonomian di kecamatan-kecamatan sekitarnya. Ibukota kabupaten dengan fungsinya sebagai pusat administrasi pemerintahan terkait erat juga sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Sektor pemerintahan disini harus dapat secara dominan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara. Sebagai kabupaten baru, Kabupaten Buton Tengah masih diliputi berbagai keterbatasan, baik fasilitas maupun data perencanaan. Dengan ditetapkannya Kecamatan Lakudo sebagai lokasi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah, maka sebagai kabupaten baru maka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan suatu lokasi yang diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah sehingga dapat memberikan fungsi sebagai pusat pelayanan.

Bertolak dari hal tersebut, pengkajian terhadap Kecamatan Lakudo sebagai lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah jika dilihat dari segi aksesibilitas prasarana wilayah masih sangat terbatas baik dari segi

infrastruktur wilayah maupun infrastruktur perhubungan yang sangat mempengaruhi jangkauan pelayanan untuk setiap daerah terutama kecamatan yang berada di Kabupaten Bombana yakni Kecamatan Talaga Raya yang juga termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Buton Tengah. Sebagai kabupaten baru, keberadaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Buton Tengah belum begitu memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya tata ruang yang komprehensif agar dalam penetapan pembangunan tidak terjadi ketimpangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Kecamatan manakah yang paling optimal sebagai lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan metode gravitasi?
2. Kecamatan manakah yang paling optimal sebagai lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan pada metode skalogram?

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kecamatan yang paling optimal sebagai lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan metode gravitasi.
2. Mengetahui kecamatan yang paling optimal sebagai lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton

Tengah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana pembangunan melalui metode skalogram.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ilmu Geografi**

Geografi berasal dari kata *geo* yang berarti bumi, dan *graphein* yang lukisan atau tulisan. Menurut pengertian yang dikemukakan Bintarto, geografi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antar manusia, ruang, ekologi, kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dan kaitan sesama tersebut (Bintarto, 1988 dalam Sumarmi, 2012).

Terdapat tiga pendekatan dalam ilmu geografi yakni: (1) pendekatan keruangan (*spatial approach*); (2) pendekatan ekologis (*ecological approach*); dan (3) pendekatan kompleks wilayah (*regional complex approach*). Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kompleks wilayah yakni suatu metode analisis yang menekankan pada variabel ruang/wilayah yang kaitannya dengan ruang/wilayah lainnya.

### **Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah**

Wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) di mana komponen-komponennya memiliki arti dalam pendeskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan (Rustiandi, et al. 2011).

Muta'ali (2011), menjelaskan

bahwa dalam menelaah konsep wilayah ada dua pandangan yang berbeda satu sama lain yaitu subyektif dan obyektif. Pandangan obyektif memandang wilayah sebagai suatu tujuan tersendiri, kebulatan riil, atau suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan dipetakan. Pandangan subyektif menganggap wilayah sebagai alat deskriptif, mendefinisikan wilayah melalui kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Konsep wilayah dan penerapannya pada dunia nyata akan menghasilkan suatu pewilayahan. Permukaan bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. Perbedaan konsep wilayah yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang dihasilkan. Rustiandi, et al. (2011), membagi wilayah berdasarkan lima konsep-konsep wilayah yaitu: (1) wilayah homogen; (2) wilayah nodal; (3) wilayah pesisir; (4) wilayah perencanaan/ pengelolaan khusus; dan (5) wilayah administrasi-politis.

Pengembangan wilayah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang menuju kondisi yang lebih baik (Muta'ali, 2011). Kondisi yang lebih baik ini dapat dilihat dari sudut ekonomi, fisik, maupun dari sudut lingkungan hidup. Menurut Muta'ali (2011), tujuan utama dari pengembangan wilayah adalah menggarap langsung persoalan-persoalan fungsional yang berkaitan dengan tingkat *Regional*/wilayah. Lebih lanjut maka pengembangan wilayah

merupakan perencanaan mengenai bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia (tenaga kerja), sumberdaya alam, maupun kesempatan-kesempatan interregional yang dikaitkan dengan prospek-prospek dan kecendrungan ekonomi dalam jangka panjang.

### **Teori Lokasi dan Fungsi Kota**

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (*spatial order*) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/atau kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2005).

Landasan dari lokasi adalah ruang (*space*). Tanpa ruang maka tidak mungkin ada sebuah lokasi. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan gangguan ketika manusia berhubungan atau bepergian dari satu tempat ketempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Makin jauh jarak yang ditempuh, makin menurun minat orang untuk bepergian dengan asumsi faktor lain semuanya sama. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat

bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki potensi tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian penting Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan dengan kegiatan lain dan dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan (berjauhan) tersebut.

Secara empiris dapat diamati bahwa pusat-pusat pengadaan dan pelayanan barang dan jasa yang umumnya adalah perkotaan (*central places*) yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan merupakan daerah inti bagi pengembangan dan pembangunan di suatu kawasan. Kota sebagai pusat pemerintahan mempunyai peran yang besar, disamping merupakan konsentrasi pemukiman penduduk, merupakan pula konsentrasi berbagai kegiatan sosial ekonomi, politik, dan administrasi pemerintah. Oleh karena itu, daerah perkotaan merupakan tempat kedudukan pimpinan pemerintahan dari berbagai tingkatan, pemusatan modal, keahlian, fasilitas pemasaran, perdagangan, pengangkutan, industri, dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi kegiatan dan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan itu sendiri (Adisasmita, 2006).

### **Teori Kutub dan Pusat Pertumbuhan**

Pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) merupakan suatu teori yang diintroduksi oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Prancis pada tahun 1955. Menurut pendapatnya, pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan diseluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasi sebagai kutub-kutub atau pusat-pusat setiap kutub mempunyai pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikan ke dalam (Adisasmita, 2006). Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan wilayah adalah sebagai penggerak utama (*prime mover*) atau lokomotif pertumbuhan, yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunannya dan dampak pertumbuhan ke wilayah di sekitarnya.

Pada dasarnya pusat pertumbuhan (*growth pole*) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik untuk (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan



masyarakat senang datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara usaha-usaha tersebut (Tarigan, 2004).

Tidak semua wilayah dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Menurut Tarigan (2004) pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu: (1) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan; (2) Ada efek pengganda (*multiplier effect*); (3) Adanya konsentrasi geografis; dan (4) Bersifat mendorong daerah belakangnya.

### **Otonomi Daerah dan Pembangunan**

Pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundang, 2000 dalam Sjafrizal, 2014). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Perubahan sistem pemerintahan

dan pengelolaan pembangunan daerah dengan adanya otonomi daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurut Sjafrizal (2014) perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu: pertama, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Lebih lanjut dikatakan bahwa kesemuanya ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih diberdayakan dan dapat melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat daerah bersangkutan.

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah ilmu tentang metode; uraian tentang metode. Sedangkan metode adalah cara yang teratur yang digunakan untuk suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam penelitian ini, metode yang dipakai meliputi penentuan daerah penelitian, pengumpulan data dan analisis data.

### **Penentuan Daerah Penelitian**

Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*)

atau berdasarkan tujuan. Daerah penelitian adalah Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara. Unit analisisnya adalah kecamatan yang termasuk dalam wilayah kajian Kabupaten Buton Tengah, yakni meliputi: (1) Kecamatan Gu; (2) Kecamatan Sangia Wambulu; (3) Kecamatan Lakudo; (4) Kecamatan Mawasangka; (5) Kecamatan Mawasangka Timur; (6) Kecamatan Mawasangka Tengah; dan (7) Kecamatan Talaga Raya.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder dari hasil studi pustaka dan teknik dokumentasi data yang berasal dari instansi yang terkait, yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data jumlah penduduk, data luas wilayah, data jarak dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, dan data sarana dan prasarana pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Buton Tengah tahun 2014.

#### **Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dari data yang diperoleh, sedangkan analisis kuantitatif bertujuan untuk melihat optimalisasi dan efisiensi pusat pemerintahan serta alternatif pengembangan wilayah dengan menggunakan metode analisis model gravitasi dan analisis skalogram.

#### **Analisis Gravitasi**

Pendekatan model gravitasi digunakan untuk menentukan lokasi yang paling optimal sebagai pusat pemerintahan dalam perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Buton Tengah. Model gravitasi adalah model yang paling banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi. Dalam perencanaan wilayah model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar, selain itu apabila kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi yang optimal (Tarigan, 2004).

Rumus gravitasi secara umum adalah sebagai berikut:

$$T_{ij} = k \frac{P_i P_j}{d_{ij}^b}$$

Keterangan:

$T_{ij}$  = Daya tarik atau banyaknya trip dari subwilayah  $i$  ke subwilayah  $j$  (perjalanan, arus barang/orang, dll),

$P_i$  = Massa subwilayah asal  $i$  (populasi/jumlah penduduk, luas wilayah, dll),

$P_j$  = Massa subwilayah tujuan  $j$  (populasi/jumlah penduduk, luas wilayah, dll),

$d_{ij}$  = Jarak antara subwilayah  $i$  dengan subwilayah  $j$

$b$  = Pangkat dari  $d_{ij}$  menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun seiring dengan pertambahan jarak. Nilai  $b$  dapat dihitung

tetapi bila tidak maka sering digunakan  $b = 2$ ,  
 $k$  = Sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman, juga dapat dihitung seperti  $b$  (Tarigan, 2004 diolah)

Sedangkan untuk menggambarkan reaksi/total *trip* yang terjadi antara subwilayah  $i$  dengan seluruh subwilayah dapat dirumuskan sebagai berikut (Tarigan, 2005):

$$\begin{aligned} T_{i1} + T_{i2} + \dots + T_{in} \\ = G \frac{P_i \cdot P_1}{d_{i1}^b} + G \frac{P_i \cdot P_2}{d_{i2}^b} \\ + \dots G \frac{P_i \cdot P_n}{d_{in}^b} \end{aligned}$$

Nilai  $G = k$

dimana penulisannya dapat disingkat menjadi:

$$\sum_{j=1}^n T_{ij} = G \sum_{j=1}^n \frac{P_i P_j}{d_{ij}^b}$$

### Analisis Skalogram

Analisis Skalogram merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hierarki atau orde pusat-pusat pemukiman atau wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode skalogram semua nama pusat wilayah, jumlah penduduk, jumlah jenis dan sarana pelayanan dicatat dalam sebuah format matriks. Pengolahan data pada matrik fungsi (daftar skalogram) dilakukan melalui perhitungan detail dengan teknik pembobotan dan pemberian ranking. Contoh matriks skalogram dapat dilihat pada Tabel 1.

**Tabel 1.** Matriks Skalogram

No.	Kec.	Jum. Pddk	Jenis Prasarana				$\Sigma$ Jenis Prasarana	$\Sigma$ Unit Prasarana	Ranking
1			SD	RS	...	dst			
2									
...									
dst									
$\Sigma$ Jenis Prasarana									
$\Sigma$ Unit Prasarana									
Penyebaran (%)									
Ranking									

Diolah dari Berbagai Sumber

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode skalogram ini adalah:

1. Bagian-bagian dari suatu wilayah disusun berdasarkan peringkat jumlah penduduk.
2. Wilayah-wilayah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis fasilitas yang dimiliki.
3. Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang memiliki fasilitas tersebut.
4. Peringkat jenis fasilitas tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah total unit fasilitas.

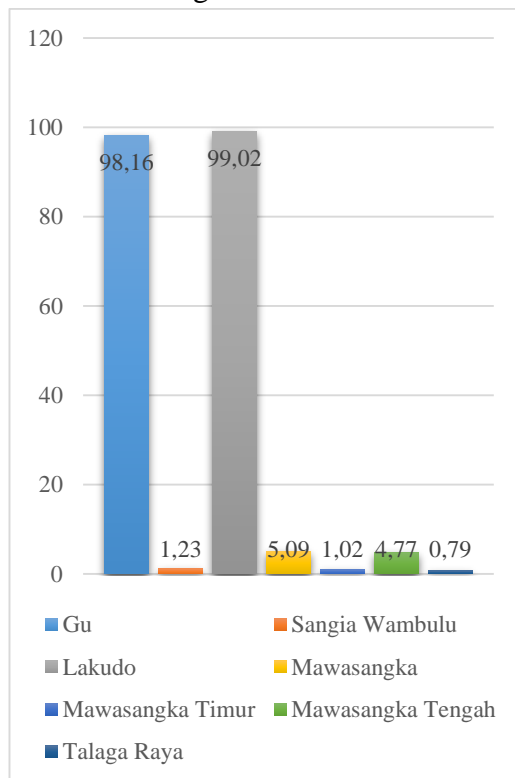
Kemudian peringkat wilayah disusun urutannya berdasarkan jumlah total fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan Berdasarkan Metode Gravitasi

Dengan menggunakan bobot jumlah penduduk pengaruh jarak, solusi optimal yang dihasilkan oleh analisis gravitasi adalah Kecamatan Lakudo. Hal ini terlihat dari Gambar 1. berdasarkan pengaruh jarak yang menunjukkan kecamatan lakudo memiliki jumlah *trip* terbanyak yakni sebesar 99,02.

**Gambar 1.** Grafik Perbandingan Nilai Gravitasi Berdasarkan Bobot Jumlah Penduduk Pengaruh Jarak

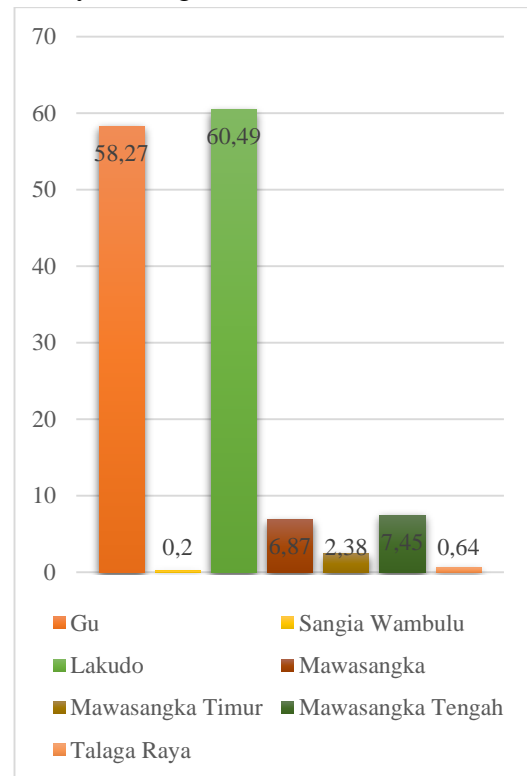


Sumber: Data Olahan

Dengan menggunakan bobot luas wilayah pengaruh jarak, solusi optimal yang dihasilkan oleh analisis gravitasi adalah Kecamatan Lakudo.

Hal ini terlihat dari Gambar 2. yang menunjukkan menunjukkan Kecamatan Lakudo memiliki jumlah *trip* terbanyak yakni sebesar 61,31.

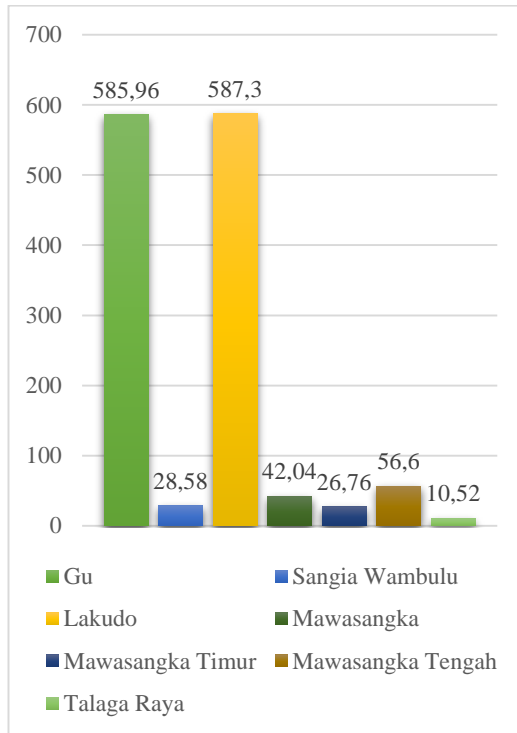
**Gambar 2.** Grafik Perbandingan Nilai Gravitasi Berdasarkan Bobot Luas Wilayah Pengaruh Jarak



Sumber: Data Olahan

Dengan menggunakan bobot sama pengaruh jarak, solusi optimal yang dihasilkan oleh analisis gravitasi adalah Kecamatan Lakudo. Hal ini dapat dilihat dari Gambar 3. yang menunjukkan bahwa Kecamatan Lakudo memiliki jumlah *trip* terbanyak yakni sebesar 587,30.

**Gambar 3.** Grafik Perbandingan Nilai Gravitasi Berdasarkan Bobot Sama Pengaruh Jarak



Sumber: Data Olahan

Hasil analisis gravitasi berdasarkan tiga bobot yang digunakan, yaitu bobot jumlah penduduk bobot luas wilayah dan bobot sama, pengaruh jarak menunjukkan Kecamatan Lakudo sebagai lokasi optimal pusat pemerintahan. Lokasi optimal di Kecamatan Lakudo artinya lokasi tersebut akan menjadi lokasi efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena lokasi yang optimal akan mendorong beraglomerasi fasilitas-fasilitas pelayanan. Sehingga Kecamatan Lakudo layak dikembangkan sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah.

### Lokasi Optimal Pusat Pemerintahan Berdasarkan Analisis Gravitasi

Pada penelitian ini terdapat 17 jenis prasarana yang menjadi variabel penelitian yaitu sarana pendidikan (TK, SD, SLTP, SLTA), fasilitas kesehatan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes, Dokter umum, Dokter Pembantu, Perawat dan Bidan), sarana peribadatan (Mesjid, Musholla, Gereja), dan sarana perkonomian (pasar dan koperasi). Berdasarkan hasil analisa skalogram dapat diketahui informasi tentang hirarki atau peringkat pusat pertumbuhan dan pelayanan dari yang paling tinggi sampai yang terendah seperti Tabel 1 dibawah ini.

**Tabel 2.** Hirarki Sarana dan Prasarana di Pusat-Pusat Pertumbuhan Dan Pelayanan Wilayah di Kabupaten Buton Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Pddk (Jiwa)	Jumlah Jenis Prasarana	Jumlah Unit Prasarana	Peringkat
1	Gu	16.258	16	140	3
2	Sangia Wambulu	5.140	14	84	4
3	Lakudo	20.718	17	171	1
4	Mawasangka	22.660	16	159	2
5	Mawasangka Timur	4.955	15	58	6
6	Mawasangka Tengah	9.390	14	81	5
7	Talaga Raya	9.257	13	56	7
Jumlah			99	749	

Sumber: Data Olahan

Hasil analisis skalogram menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan dan pelayanan yang juga dapat dijadikan pusat pemerintahan yang menempati peringkat (*rank*) yang paling tinggi dalam ketersediaan sarana dan prasarana/fasilitas pelayanannya adalah Kecamatan Lakudo. Sarana dan prasarana yang relatif lengkap dibuktikan dengan hasil analisis skalogram dimana Kecamatan Lakudo memiliki jumlah jenis sarana dan prasarana pembangunan terbanyak yaitu 17 jenis dan memiliki jumlah unit sarana dan prasarana pembangunan terbesar yaitu 171 unit.

Jika dihubungkan antara metode analisis gravitasi dan analisis skalogram menunjukkan kecamatan lakudo sebagai lokasi optimal pusat pemerintahan, hal ini juga sejalan dengan keputusan pemerintah daerah. Dengan demikian Kecamatan Lakudo telah layak untuk menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah.

## KESIMPULAN

1. Berdasarkan analisis gravitasi dengan menggunakan indikator bobot jumlah penduduk, bobot luas wilayah dan bobot sama pengaruh jarak, menunjukkan hasil yang sama yaitu Kecamatan Lakudo merupakan pusat pemerintahan yang optimal. Artinya sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat pertumbuhan, wilayah tersebut dapat memberikan efisiensi bagi pelayanan

pembangunan dan dapat mendorong beraglomerasinya fasilitas-fasilitas pelayanan.

2. Berdasarkan analisis skalogram menunjukkan bahwa pusat pertumbuhan dan pelayanan yang juga dapat dijadikan pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah adalah Kecamatan Lakudo. Kecamatan lakudo memiliki sarana dan prasarana yang relatif lengkap yaitu 17 jenis unit sarana dan prasarana pembangunan terbesar yaitu 171 unit.

## SARAN

1. Untuk penelitian lebih lanjut, pada analisis gravitasi untuk wilayah kepulauan rumus gravitasi perlu dikaji lagi karena menggunakan jarak absolut. Disamping itu, disarankan selain menggunakan variabel pengaruh jarak, juga menggunakan variabel pengaruh waktu tempuh dan besarnya biaya (ongkos) yang dikeluarkan untuk menempuh suatu daerah dalam hal ini antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah.
2. Untuk penelitian lebih lanjut, pada analisis skalogram diharapkan peneliti menambah jenis sarana dan prasarana pembangunan yang akan dianalisis.
3. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji mengenai daya dukung wilayah, hal ini dilakukan sebagai alternatif pengembangan wilayah di Kabupaten Buton Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muta'ali, Lutfi. 2011. *Kapita Selekta Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Rustiadi, Ernan., Saefulhakim, Sunsun dan R. Panuju, Dyah. 2009. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sumarmi. 2012. *Pengembangan Wilayah Berkelanjutan*. Yogyakarta: Aditya Media Publishing.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.